



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2146 TAHUN 2015

TENTANG

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

1

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015.
- KESATU :** Menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 dengan Indikator Ekonomi Makro dan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2146 TAHUN 2015
Tanggal 9 Oktober 2015

PERJANJIAN KINERJA

UNIT SATUAN KERJA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN : 2015

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2015)
1.	Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota	1. Persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m ²) di lokasi binaan dan lokasi sementara	7.005 m ²
2.	Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal	1. Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN : 12.15 Triliun PMA : 55,62 Triliun
		2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN : 96 Proyek PMA : 1.350 Proyek
3.	Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang publik	1. Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun	125 Titik
4.	Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota	1. Jumlah SPBG	22 SPBG
5.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1. Persentase rencana bangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli	100%
		2. Persentase pembongkaran bangunan yang tidak sesuai	50%

f

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2015)
6.	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	1. Panjang Lintasan Busway	
		2. Jumlah penumpang busway	337.000 / hari
		3. Headway busway rata-rata	9 menit
7.	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota	1. Luas jalan yang terbangun	24.192 m ²
		2. Jumlah jembatan yang terbangun	1 jembatan
		3. Persentase luas jalan dalam kondisi baik	97,20 %
8.	Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya	1. Jumlah sumur resapan (Injection Well) waduk yang terbangun	4 sumur resapan
		2. Jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor	0
		3. Panjang pengaman pantai yang terbangun	1.500 m ²
9.	Tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara optimal	1. Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat	Pembebasan lahan IPAL Zona 1 lanjutan dan penyusunan AMDAL Zona 6
10.	Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani semua wilayah kota	1. Cakupan pelayanan air minum perpipaan	62%
11.	Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman	1. Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu	96%
		2. Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber	15%
12.	Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah, dan udara) di wilayah kota Jakarta	1. Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari bussiness as usual (BAU) dengan baseline emisi GRK tahun 2005.	6%
		2. Persentase status mutu air tercemar berat di:	
		- sungai	62%
		- situ/waduk	34,50%
		- air tanah	9%
- laut/teluk	15%		
13.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana dan dampak	1. Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang kompeten dan terampil	2.424 orang
		2. Jumlah organisasi masyarakat peduli bencana/Balakar	2.800 orang
14.	Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat	1. Persentase jumlah kebutuhan tempat tinggal yang terpenuhi	25% dari 8.000 Unit

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2015)
15.	Tertatanya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan Kampung)	1. Jumlah RW Kumuh yang tertata	68 RW
16.	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta	1. Rasio ruang terbuka hijau terhadap luas daratan	10,56%
		2. Rasio ruang terbuka biru terhadap luas perairan di darat	5 hektar hutan kota 3,20%
		3. Jumlah lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik	40 lokasi
17.	Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas	1. Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan	86
18.	Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta	1. Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu	40 Lokasi Pusat Kebudayaan
19.	Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota	1. Jumlah pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya melalui konservasi	17 Bangunan 5 Lingkungan Cagar Budaya
20.	Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	1. Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat	16 Konflik
		2. Indeks demokrasi	81,98
21.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1. Jumlah lokasi rawan ketertiban umum	19 Lokasi
22.	Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih	1. Indeks efektifitas pemerintahan	0,3
23.	Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kompetensinya	1. Terpenuhinya SDM aparatur melalui sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) sesuai formasi jabatan	2000 Orang
24.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1. Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP
25.	Pelayanan publik yang prima pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu	1. Integritas pelayanan publik	8,4

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2015)
26.	Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	2. Sistem pelayanan perizinan terpadu secara on-line	1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perizinan Terpadu 3) 7.205 pemohon perizinan 4) Tingkat kepuasan masyarakat 91,89%
		3. Sistem pelayanan pajak online (non kendaraan bermotor)	10.445 WP
27.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	1. Angka Melek Huruf	99,95 %
		2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,55 Tahun
28.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu	40 per 100.000 Kelahiran Hidup
		2. Angka Kematian Bayi	7,3 bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
		3. Angka Usia Harapan Hidup	76,60 Tahun
29.	Meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapatkan pelayanan KB	1. Total Fertility Rate	2,2

Jumlah APBD Tahun 2015 : 63.650.105.000.000
 Jumlah Anggaran Belanja Tahun 2015 : 24.760.911.186.368
 Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015 : 38.889.193.813.632

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,



(Signature)
 BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2146 TAHUN 2015
Tanggal 9 Oktober 2015

INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NO.	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2015
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,8 - 6,3%
2.	Tingkat Inflasi	5 - 6%
3.	PDRB Harga Berlaku	1.969,69 triliun
4.	PDRB Harga Konstan Tahun 2010	1.463,68 Triliun
5.	Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,10%
	B. Pertambangan dan Penggalian	0,26%
	C. Industri Pengolahan	13,86%
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,32%
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04%
	F. Konstruksi	13,25%
	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,75%
	H. Transportasi dan Pergudangan	3,22%
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,41%
	J. Informasi dan Komunikasi	7,20%
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10,25%
	L. Real Estate	6,30%
	M, N. Jasa Perusahaan	7,11%
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,44%
	P. Jasa Pendidikan	5,24%
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,66%
	R. Jasa Lainnya	3,59%
6.	Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran	
	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,12%
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,81%
	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,18%
	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	41,20%
	5. Perubahan Inventori	0,28%
	6. Ekspor Barang dan Jasa	16,30%
	7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	60,09%
	8. Net Ekspor Antar Daerah	30,21%

NO.	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2015
7.	PDRB Per Kapita	193.526.508
8.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	2,10%
9.	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB	1,83%
10.	Rasio Dana Perimbangan terhadap PDRB	0,54%
11.	APBD	69,28 triliun
12.	ICOR	8,87
13.	Kemampuan Investasi Pemprov DKI Jakarta	11,9 triliun
14.	Peranan Investasi Pemprov DKI Jakarta Terhadap Investasi Total	1,45%
15.	Ekspor	
	a. Melalui pelabuhan muat DKI Jakarta	47.066 juta Dollar AS
	b. Produk asal DKI Jakarta	9.949 juta Dolar AS
16.	Impor melalui pelabuhan muat DKI Jakarta	74.409 juta Dolar AS
17.	Jumlah Wisman	2,24 juta orang
18.	Jumlah Penduduk	10,18 juta orang
19.	Kepadatan Penduduk	15.388 penduduk/km ²
20.	Angka Kelahiran Total (TFR)	1,84 per wanita kawin
21.	Jumlah Angkatan Kerja	5,55 juta orang
22.	Jumlah Penduduk Bekerja	5,08 juta orang
23.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,36%
24.	Jumlah Penduduk Miskin	424,55 ribu orang
25.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	4,17%
26.	Indeks Pembangunan Manusia	78,81
27.	Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	
	- SD	111,9%
	- SMP	113,3%
	- SMA dan SMK	95,00%

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA